

BULETIN EKONOMI

JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN EKONOMI PEMBANGUNAN

Volume 12, Nomor 2, Desember 2014

ISSN 1410-2293

Model Pengembangan *Border Tourism* bagi Kawasan Perbatasan Studi Kasus: Sota, Merauke, Papua

Asep S, Iva R & Fauzan

Daya Saing Pariwisata Indonesia tahun 2011-2013 Menuju ASEAN *Economic Community* (AEC)

Sri Rahayu Budi Hastuti

Kesuksesan Karir Dosen Melalui: Kepribadian dan Motivasi (Studi pada Perguruan Tinggi di Wilayah Cirebon)

Sari Sari Laelatu Q & Wiwi H

Pengaruh *Familiarity* dan *Gender* pada Tipe Alternatif Komunikasi dalam Tim Audit

Sultan, Kaharudinsyah LS & Sri Luna M

Analisis Faktor-Faktor dalam Membangun Kepercayaan, dan Loyalitas Nasabah Melalui Kepuasan, Reputasi Ditinjau dari Kualitas Layanan pada *Baitul Maal Attamwil* (BMT) di Kabupaten Kudus

Noor A, Dwi S & Ratna YW

Pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Loan* dan *BI Rate* terhadap Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011.01–2014.06

Wahyu Dwi Artaningtyas

The Analysis of Selected Macroeconomic Variables that Influence Stock Returns' Jakarta Islamic Index (JII) and Its Vector Autoregressive (VAR) Forecasting, Case Study: 10 Companies Listed in Jakarta Islamic Index Period 2008-2012

Febryan Mujahid P & Agus Tri B

Analisis VAR (*Vector Auto Regressive*) pada Keterkaitan Antara PDRB Menurut Lapangan Usaha dengan Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2000.1-2011.4

Bambang Sulistiyono

Asimetri Informasi dan Indikasi Praktik Manajemen Laba pada Perusahaan

Nafi' Inayati Zahro

BULETIN EKONOMI

JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN EKONOMI PEMBANGUNAN

Volume 12, Nomor 2, Desember 2014

ISSN 1410-2293

SUSUNAN REDAKSI BULETIN EKONOMI Fakultas Ekonomi UPN "Veteran" YOGYAKARTA

Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Ekonomi UPN "Veteran" Yogyakarta. Dr. Muafi, SE., M.Si
Pengarah	: Drs. Purwiyanta, M.Si
Ketua Umum	: Dr. M. Irhas Effendi, M.Si
Ketua Redaksi	: Dr. Heru Tri Sutiono, M.Si Dra. Sri Wahyuni Widiastuti, M.Sc Dr. C. Ambar Pujiharjanto, MS
Reviewer	: Prof. Dr. Didit Welly Udjiyanto, MS Prof. Dr. Arief Subyantoro, MS Dr. Haddy Suprpto, MS Dr. Yuni Istanto, M.Si Dr. Hiras Pasaribu, M.Si, Ak Dr. Joko Susanto, SE, M.Si Dr. Hendro Wijonarko, SE, MM Dr. Noto Pamungkas, M.Si
Sekretaris	: Sultan, SE, M.Si Drs. Tugiyono, MM Titik Kusmantini, SE, M.Si
Bendahara	: Dr. Winarno, MM Haniyanti
Sirkulasi	: Dra. Ec. Eko Wahjoe N, MM Retno Setyo Yuniarsih, SE Iskak Qomarudin
Alamat Redaksi	: Gedung FE UPN "Veteran" Yogyakarta Jl. SWK 104 Lingkar Utara Condong Catur Yogyakarta 55283 Telp. 0274-486255, Fax. 0274-486255 E-mail: buletinekonomiupnyk@yahoo.com

Buletin Ekonomi
Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan

Diterbitkan oleh FE UPN "Veteran" Yogyakarta sebagai media yang bertujuan untuk menyebarkan hasil penelitian maupun telaah teori yang berhubungan dengan ilmu manajemen, akuntansi dan ekonomi pembangunan. Buletin Ekonomi terbit setahun dua kali, setiap bulan April dan Desember dengan format A4. Redaksi menerima artikel dari siapapun baik yang ditulis dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Untuk Informasi Berlangganan dipersilahkan menghubungi Redaksi pada alamat di atas.

BULETIN EKONOMI

JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN EKONOMI PEMBANGUNAN
 Volume 12, Nomor 2, Desember 2014 ISSN 1410-2293

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Model Pengembangan <i>Border Tourism</i> bagi Kawasan Perbatasan Studi Kasus: Sota, Merauke, Papua Asep Saepudin, Iva Rachmawati dan Fauzan	125-144
Daya Saing Pariwisata Indonesia tahun 2011-2013 Menuju ASEAN <i>Economic Community</i> (AEC) Sri Rahayu Budi Hastuti	145-154
Kesuksesan Karir Dosen Melalui: Kepribadian dan Motivasi (Studi pada Perguruan Tinggi di Wilayah Cirebon) Sari Sari Laelatu Qodriah dan Wiwi Hartati	155-166
Pengaruh <i>Familiarity</i> dan <i>Gender</i> pada Tipe Alternatif Komunikasi dalam Tim Audit Sultan, Kaharudinsyah Leon Sakti dan Sri Luna Murdianingrum	167-180
Analisis Faktor-Faktor dalam Membangun Kepercayaan, dan Loyalitas Nasabah Melalui Kepuasan, Reputasi Ditinjau dari Kualitas Layanan pada Baitul Maal Attamwil (BMT) di Kabupaten Kudus Noor Azis, Dwi Soegiarto dan Ratna Yulia Wijayanti	181-198
Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> , <i>Non Performing Loan</i> dan <i>BI Rate</i> terhadap Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011.01– 2014.06 Wahyu Dwi Artaningtyas	199-208
<i>The Analysis of Selected Macroeconomic Variables that Influence Stock Returns' Jakarta Islamic Index (JII) and Its Vector Autoregressive (VAR) Forecasting, Case Study: 10 Companies Listed in Jakarta Islamic Index Period 2008-2012</i> Febryan Mujahid Panatagama dan Agus Tri Basuki	209-226
Analisis VAR (<i>Vector Auto Regressive</i>) pada Keterkaitan Antara PDRB Menurut Lapangan Usaha dengan Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2000.1-2011.4 Bambang Sulistiyono	227-240
Asimetri Informasi dan Indikasi Praktik Manajemen Laba pada Perusahaan Nafi' Inayati Zahro	241-248

**MODEL PENGEMBANGAN *BORDER TOURISM*
BAGI KAWASAN PERBATASAN
STUDI KASUS: SOTA, MERAUKE, PAPUA**

Asep Saepudin¹
Iva Rachmawati²
Fauzan³

Abstract: *Border Tourism Development Model Areas For Border Case Study: Sota, Merauke, Papua.* This article shows that the model of tourism development in the border Sota is based on two main pillars of Eco Tourism and Culture Tourism. To realize the main pillars need to be supported by four pillars: community empowerment through cooperation between local governments, non-governmental organizations or universities and traditional leaders or religious leaders, developing the tourist supporting infrastructures, local government policies that support border tourism, as well as the integrative promotion. This Model is based on the presence of potential border tourism and the potential problems in the management of borders lie within the region. Potential factors include the potential related to the specific geographic and demographic conditions in sota border region. The potential problems include the response of the local community who do not support the development of tourism, there is not Master Plan of Border Tourism Development, the sectoral management of border areas, non integrated promotion and inadequate the supporting infrastructure in border area.

Abstrak: Model Pengembangan *Border Tourism* Bagi Kawasan Perbatasan Studi Kasus: Sota, Merauke, Papua. Artikel ini menunjukkan bahwa model pengembangan pariwisata di perbatasan Sota didasarkan pada dua pilar utama Pariwisata Eco dan Pariwisata Budaya. Untuk mewujudkan pilar utama perlu didukung oleh empat pilar: pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama antara pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah atau universitas dan para pemimpin tradisional atau pemimpin agama, mengembangkan wisata infrastruktur pendukung, kebijakan pemerintah daerah yang mendukung pariwisata perbatasan, serta sebagai promosi integratif. Model ini didasarkan pada adanya potensi wisata perbatasan dan potensi masalah dalam pengelolaan perbatasan terletak di kawasan ini. Faktor potensial termasuk potensi yang terkait dengan kondisi geografis dan demografis tertentu di wilayah perbatasan sota. Masalah potensial meliputi respon dari masyarakat setempat yang tidak mendukung pengembangan pariwisata, tidak ada Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Perbatasan, manajemen sektoral daerah perbatasan, non promosi terpadu dan memadai infrastruktur pendukung di daerah perbatasan.

¹ Dosen Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, email: aasaepudin52@yahoo.co.id

² Dosen Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

³ Dosen Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

Kata Kunci: Pariwisata Perbatasan, Eco Tourism, Wisata Budaya, pemberdayaan masyarakat, kebijakan pemerintah daerah, promosi integratif, infrastruktur wisata pendukung.

PENDAHULUAN

Perbatasan Indonesia dan Papua Nugini (PNG) di Merauke masih merupakan pelintasan tradisional. Artinya, perlintasan yang ada belum mengadopsi sarat-sarat keutamaan sebuah pengelolaan perbatasan. Fungsi CIQS (*Customs, Immigration, Quarantine, and Security*) adalah fungsi yang menyelenggarakan pengawasan terhadap arus lalu lintas barang dan manusia, pengawasan terhadap kesehatan barang, manusia dan hewan yang melintas serta fungsi keamanan. Namun demikian, beberapa “pintu” yang ada di Merauke yaitu di kawasan Muting, Elikobel, Bupul dan Sota telah mejadi jalan bagi beberapa pelintas batas tradisional.

Dari beberapa “pintu” yang ada tersebut, kami memilih Sota karena Sota relatif telah terkelola dengan baik meski keempat fungsi PLB atau Pos Lintas Batasnya belum berjalan dengan baik. Sota memiliki jalur transportasi yang jauh lebih baik di dibandingkan yang lain dan terutama karena pelintas batas mencapai 150-300 setiap bulannya dari PNG ke Indonesia. Pengembangan kawasan perbatasan ini juga sebagai tujuan wisata alternative juga diungkapkan oleh Ir. Untoro Sardjito, MM (Tenaga Ahli BNPP), yang disampaikan dalam sebuah wawancara penelitian:

“Merauke, kecamatan Sota merupakan kawasan perbatasan yang paling baik dari segi jalan maupun fasilitasnya. Ia juga merupakan area transit bagi mereka yang akan pergi ke Boven Digul, Muting atau Elikobel. Dengan demikian selain bisa dikembangkan menjadi border turisme bisa juga dikembangkan menjadi area transit bagi mereka yang akan pergi ke arah utara. Potensinya cukup baik apalagi jika jalan ke Jayapura sudah jadi. Kawasan Sota juga dapat dikembangkan menjadi border tourism melihat ketertarikan warga yang mengunjungi wilayah perbatasan sebagai salah satu tempat alternative untuk berwisata. Hanya saja hal ini belum terlembagakan, jika saja bisa diwacanakan maka hal ini juga bisa menguatkan ekonomi sekitar” (Hasil wawancara yang direkam pada 5 Maret 2013 di Distrik Merauke).

Dari penelitian kluster yang telah dilakukan Iva Rachmawati, *et. all.* 2013, terlihat bahwa tingginya kontak yang dilakukan antara para pelaku perdagangan tradisional telah menumbuhkan pasar dadakan di akhir minggu dan menarik minat beberapa penduduk lokal untuk berkunjung dan menikmati ramainya pasar tersebut sembari menikmati kawasan perbatasan yang masih asri dan banyak ditumbuhi oleh Musamus atau rumah semut. Musamus atau rumah semut merupakan fenomena khas Merauke yang merupakan fenomena langka dan dapat menjadi salah satu ikon wisata yang baik bagi Sota. Rumah Semut ini tingginya bisa mencapai 3 meter dan hanya terdapat wilayah tertentu saja.

Secara kebetulan, Sota juga merupakan sebuah transit area bagi mereka yang hendak pergi ke wilayah di utara Merauke seperti Jayapura, Boven Digul, Pegunungan Bintang atau ke Muting dan Elikobel. Maka dalam penelitian kluster Iva Rachmawati *et.all.* 2013 tersebut juga disebutkan bahwa kawasan ini mampu berkembang menjadi sebuah transito area yang juga dapat menjadi pusat bagi aglomerasi ekonomi bagi Merauke.

Penelitian ini berusaha menemukan model bagi pengembangan kawasan perbatasan sebagai sebuah border tourism yang mampu menjadi salah satu pusat dari aglomerasi ekonomi bagi wilayah Merauke. Ada beberapa model yang dikembangkan dalam industry wisata perbatasan. Melalui literarture review yang lakuikan ada beberapa model yang telah dikembangkan oleh akademisi yang melakukan studi terhadap industry pariwisata khususnya industry pariwisata pada perbatasan.

Seric dan Markovic menyadari bahwa ‘brands’ atau merek memiliki kaitan yang erat dengan perilaku wisatawan dan pilihan-pilihan mereka terhadap tujuan wisata. *Strong*

'brands create strong thoughts and emotions in the tourist's awareness', demikian pendapat Morgan dan Pritchard (Morgan dan Pritchard dalam Seric dan Markovic, 2011). Melalui risetnya pada kawasan perbatasan di Kroasia (Karlovac Country)/CRO dan Slovenia (Slovenia Tenggara)/SLO, Seric dan Markovic melihat bahwa kerjasama antar negara dapat memberikan platform bagi 'brand management' kawasan wisata perbatasan. Seric dan Markovic menyadari bahwa tidak seluruhnya kawasan memiliki sumber daya yang sama dan relevan terhadap kawasan perbatasan, sementara ada kawasan lain yang memiliki sumber daya yang cukup potensial dan dapat dikembangkan dalam industry pariwisata. Melalui model 'umbrella brands atau pemilihan 'brand' yang dapat memayungi atau mewakili keseluruhan potensi pariwisata yang dimiliki kedua negara yang berbatasan. Daya saing yang dapat dihasilkan dari model ini sangat tergantung dari keberagaman potensi kawasan wisata dan upaya negara dalam melekatkan 'brand' yang dapat mewakili keberagaman tersebut. Untuk itu selain diperlukan komunikasi yang baik antara pengelola kawasan wisata dari kedua negara, interaksi dengan keseluruhan elemen pendukung industry pariwisata di perbatasan menjadi hal yang tidak kalah pentingnya untuk dilakukan. Demikian pula mengetahui persepsi yang telah terbangun di benak wisatawan dapat memberikan kontribusi penting bagi pembentukan 'brand' yang cukup kuat. Untuk dapat mengembangkan model ini, Seric dan Markovic mempersaratkan 3 fase yang mesti dilalui, fase pertama adalah membentuk kerangka kerja dan kondisi yang dapat memberi kontribusi bagi partisipasi yang efektif untuk semua elemen terkait. Fase kedua merupakan fase untuk memfokuskan keseluruhan aktifitas pada pembangunan tujuan yang berorientasi pemasaran strategis. Ketiga, pembentukan format atau struktur kerjasama dengan menghubungkan stake holder dari level regional hingga level lokal.

Model yang dibuat oleh Seric dan Markovic ini didasarkan atas 3 platform yaitu,

- 1) Brand management area untuk perbatasan untuk kedua negara
- 2) Brand management area untuk produk wisata kawasan perbatasan
- 3) Brand management untuk sebagian produk wisata untuk kawasan yang terpisah di kedua negara.

Bagi Seric dan Markovic, area perbatasan memang merupakan kawasan perbatasan yang kompleks, namun demikian justru perbedaan budaya dan sejarah yang dimilikinya justru dapat menjadi daya saing yang cukup baik jika dapat digali dan dikelola dalam sebuah kerjasama antar negara.

Model Kolaborasi ditawarkan oleh Gupta dan Dada dalam mengelola perbatasan India Kashmir dan Sino-Pak Kashmir. Model ini didukung oleh kerjasama dan inter-group contact yang justru seringkali mengalami pergesekan kepentingan untuk meningkatkan kerjasama dan pemahaman. Bagi Gupta dan Dada, model ini tidak hanya dapat meningkatkan pembangunan kawasan perbatasan tetapi juga dapat menjadi model bagi resolusi konflik yang seringkali terjadi di sepanjang perbatasan Kashmir (Gupta dan Dada, 2011). Gupta dan Dada mengadaptasi model kerjasama Sonmez dan Apostolopoulos yang menawarkan kerjasama berkesinambungan antara stake holder dengan secara bertahap menghilangkan hambatan yang muncul diantara kedua negara. Sejalan dengan hal tersebut, Gupta dan Dada berusaha membangun relasi atau kontak yang lebih baik diantara kelompok etnis yang berbeda di kawasan perbatasan untuk bersama-sama menyamakan persepsi dan tujuan mengenai pengelolaan perbatasan tanpa diskriminasi. Beragamnya kelompok etnis memang menjadi persoalan tersendiri pembangunan kawasan perbatasan (Jiaying Zhang, Robert J. Inbakaran dan Mervyn S. Jackson. 2006). Upaya semacam ini selain melibatkan stake holder, juga melibatkan pemerintah secara langsung, aktor/pelaku bisnisan pada industry pariwisata, penduduk lokal serta lembaga non pemerintah.

Model Kolaboratif juga dipakai oleh Prokkola dalam membangun model bagi pengelolaan wisata perbatasan di perbatasan Swedia dan Finlandia (Prokkola, 2008). Model

ini dirujuk sebagai acuan bagi pengelolaan perbatasan kedua negara yang secara politis memiliki kebijakan yang berbeda. Dengan kesadaran kedua negara untuk bersedia menurunkan level kedaulatan mereka masing-masing 4 kawasan yang memiliki kawasan tujuan wisata menyerahkan sebagian pengelolaan kawasan kepada pemerintah lokal dan sebagian lagi kepada pihak swasta. Baik dalam pengambilan keputusan dan pendanaan dalam pengelolaan wisata perbatasan, sistem bersifat desentralisasi. Namun, Prokkola menengarai bahwa perlu adanya kemandirian yang lebih dalam hal pendanaan dan manajemen pengelolaan pada perbatasan yang terletak di kawasan pedesaan. Lebih rendahnya sumber daya manusia dan lebih sedikitnya daya tarik yang disediakan oleh kawasan perbatasan, ketergantungan pendanaan menurut Prokkola menjadi penyebab atau hambatan bagi pembangunan industri pariwisata yang berkelanjutan. Pada bagian berikut dapat dilihat kerjasama pada berbagai level diselenggarakan di keempat kawasan perbatasan Swedia Finlandia.

Suku asli terbesar yang tinggal di wilayah Merauke adalah suku Marind atau marind-Anim (Anim=orang) Ada yang berpendapat bahwa suku asli Merauke adalah suku Malind, sedangkan suku Marind adalah suku yang telah bercampur dengan suku dari luar Merauke. Kedatangan suku lain dari luar Merauke telah memunculkan perkawinan silang antara mereka dan suku Marind adalah kelompok suku Malind yang telah bercampur dengan suku lain. Saat ini untuk menemukan suku Malind sudah sangat sulit. Suku Malind atau Marind ini memiliki 7 sub suku, yaitu Gebze, Mahuze, Ndiken, Kaie, Balagaize, Samkakai dan Basikbasik (Pusaka, 2013) Sedangkan mengacu pada catatan Corbey ada 4 sub suku dalam Marind yaitu Geb-ze, Mahu-ze, Aramemb dan Bragai-ze. (Raymond Corbey, 2010). Selain suku Marind atau Malind, beberapa suku asli Merauke juga tinggal di Sota adalah Kanum dan Yeinan. Ada sebagian yang memahami bahwa Kanum dan Yeinan bagian dari Marind-Anim juga, namun ada pula yang membagi Marind ke dalam 7 sub suku seperti yang disebutkan. Orang Marind di Merauke masih memiliki kekerabatan yang dekat dengan Marind di Papua Nugini. Oleh karenanya, masyarakat Sota di perbatasan banyak memiliki keluarga di wilayah Weam dan Morehead di Papua Nugini. Kegiatan adat dan hubungan sosial merupakan salah satu tujuan pelintas batas Sota dan Weam serta Morehead.

Wilayah Sota merupakan bagian dari kawasan yang ditetapkan sebagai taman nasional, yaitu Taman Nasional Wasur. Taman Nasional Wasur merupakan salah satu kawasan pelestarian alam yang memiliki keanekaragaman potensi sumber daya alam yang sangat kompleks, baik itu ditinjau dari sudut pandang keanekaragaman hayati keragaman budaya etnikal yang terdapat di kawasan tersebut. Kawasan pelestarian ini mewakili habitat-habitat tropis basah dan kering yang tidak terdapat di tempat lainnya di Indonesia, di tingkat dunia terbatas dalam wilayah barat daya Papua Nugini dan bagian utara Australia (Paranginangin, 1994). Di Taman Nasional Wasur terdapat 11 (sebelas) desa dan 1 (satu) kampung yaitu, Desa Wasur (di sektor Jalan Trans Irian), Desa Rawa Biru (di sektor Jalan Trans Irian), Desa Yanggandur (di sektor Jalan Trans Irian), Desa Sota (di sektor Jalan Trans Irian), Desa Kuller (di sektor pantai), Desa Onggaya (di sektor pantai), Desa Tomer (di sektor pantai), Desa Tomerauw (di sektor pantai), Desa Kondo (di sektor pantai), Desa Sota (di sektor Sungai Maro), Desa Tambat (di Sektor Sungai Maro), Kampung Bokrum (di sektor Sungai Maro).

Salah satu didirikannya tujuan Taman Nasional Wasur adalah Peningkatan kegiatan pariwisata dan rekreasi di dalam kawasan TNW baik untuk tujuan wisata alam, minat khusus dan budaya dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas kunjungan sebagai upaya peningkatan pemanfaatan kawasan sekaligus upaya peningkatan kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap konservasi alam serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain terdapat tujuan lainnya yaitu perlindungan fungsi hidrologi, keseimbangan ekologi, kestabilan iklim mikro dan kesuburan tanah; Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem asli, Trans-Fly dan habitat burung-burung migrasi;

peningkatan upaya penggalian kearifan tradisional masyarakat dan penelitian flora-fauna TN Wasur, baik untuk kepentingan pengelolaan kawasan maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosial-ekonomi dan budaya masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan; peningkatkan dan pengembangan tradisi masyarakat yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta penggunaan kawasan beserta seluruh potensinya sebagai wahana pendidikan konservasi alam dalam rangka mencapai tingkat kesadaran dan apresiasi masyarakat yang tinggi terhadap kepentingan konservasi alam; peningkatan peran kawasan TNW sebagai sumber plasma nutfah potensial dalam menunjang budidaya; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan TNW sebagai upaya pengalihan tekanan/gangguan terhadap kawasan melalui pengelolaan TNW dalam pengembangan budidaya flora-fauna potensial, kerjasama dan koordinasi dengan instansi/lembaga/pihak terkait dalam rangka memaduserasikan kegiatan pengelolaan kawasan dengan pembangunan daerah di sekitarnya.

Sota sebagai wilayah Transit

Wilayah perbatasan Sota merupakan wilayah transit bagi warga dan para pedagang yang akan pergi ke Distrik Muting atau Ulilin atau bahkan hendak ke Kabupaten Boven Digoel serta pegunungan Bintang. Sebelum ada jalan yang dibangun, Merauke – Boven Digoel hanya bisa dijangkau dengan kuda yang membutuhkan waktu satu minggu. Saat ini untuk mencapai Boven Digoel, warga dapat mengendarai mobil beroda besar dengan tarif sekitar Rp.700.000,- per orang atau 8 sampai 10 juta untuk menyewa satu buah modil beroda besar. Perjalanan akan membutuhkan waktu tempuh sekitar 8 jam tergantung cuaca. Dan biasanya dari dan ke Boven Digoel mereka selalu transit di Sota yang menyediakan warung makan, pasar dan juga poma bensin. Sebagai wilayah transit ini, Sota memiliki potensi sebagai simpul aglomerasi ekonomi jika didukung dengan infrastruktur yang baik.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian lapangan, dalam rangka pengembangan wisata di Perbatasan Sota, terdapat beberapa masalah yaitu: **pertama**, tata Ruang dalam mendukung Border Tourism belum tertata. Hal ini ditunjukkan dengan adanya berbagai bangunan untuk mendukung wisata di Sota belum sesuai ketentuan yang ada, baik aturan domestik maupun aturan internasional, terkait dengan pemanfaatan netral zone di batas kedua negara. Belum dikelolanya fasilitas wisata yang dirintis oleh Pak Ma'ruf (Kapolsek Sota) serta belum operasinya pasar di dekat pos lintas batas merupakan contoh tata ruang yang belum baik. Seperti adanya rencana pembangunan terminal di Sota oleh dinas perhubungan Merauke, sekretaris dinas, Ibu Ajriati mengatakan bahwa sebelum melakukan hal tersebut perlu diperhatikan tata ruangnya karena sota merupakan kawasan hijau. Hal senada juga dikemukakan oleh Kepala Dinas Pariwisata, Bapak Daud Hollenger bahwa: "Pengembangan kawasan sota belum selesai dan merupakan kawasan steril tapi memang ada ruang untuk pembangunan seperti telah dibangun tugu salib di wilayah perbatasan". (hasil wawancara tanggal 18 Agustus 2014 di Merauke). Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Merauke, Bapak Albert Muyak bahwa:

"Wisata perbatasan merupakan hal yang bagus karena untuk jangka panjang wilayah perbatasan sebagai tempat wisata dapat dibangun kota ekonomi kecil yang mendukung kegiatan wisata di wilayah perbatasan. Kota ekonomi kecil yang dimaksud adalah, pembangunan dan penataan beberapa fasilitas pendukung di sekitar tugu Sabang-Merauke seperti terminal, penginapan dan pasar. Sota dapat dijadikan sebagai kota ekonomi baru yang bisa menjadi penghubung beberapa kabupaten hasil pamekaran" (hasil wawancara tanggal 15 Agustus 2014).

Kedua, sarana pendukung border tourism seperti transportasi, terminal dan tempat singgah belum ada. Seperti dikemukakan sebelumnya bahwa Sota adalah wilayah transit,

namun belum ada terminal yang cukup memadai. Namun demikian, telah disampaikan oleh sekretaris Dinas Perhubungan Merauke bahwa, dinas telah merencanakan untuk membangun terminal di Sota. Begitu juga tempat transit yang cukup layak belum dibangun. Kepala Bidang Pengembangan wilayah dan sarana prasarana fisik Bappeda Merauke mengakui bahwa “*sarana dan prasarana di Merauke atau wilayah perbatasan masih kurang*”. (hasil wawancara tanggal 15 Agustus 2014 di Merauke).

Ketiga, pembangunan wilayah perbatasan belum terintegrasi dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait karena belum memiliki RIP (Rencana Induk Pengembangan) wisata perbatasan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Merauke bahwa kabupaten Merauke memang belum memiliki Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Peraturan Daerah tentang Pariwisata. Yang rencananya akan mulai dibahas pada tahun 2015.

Keempat, kordinasi antara pemerintah daerah dan pengelola balai TNW belum baik. Hal ini telah disampaikan oleh kepala Dinas Pariwisata dan Kepala Balai Taman Nasional Wasur dalam wawancara bahwa program-program pembangunan di wilayah perbatasan, khususnya pembangunan yang terkait wisata masih bersifat egosektoral. Kepala dinas pariwisata mengemukakan bahwa kendala utama yang dihadapi adalah komunikasi dan interaksi antara pemerintah daerah dengan pengelola Balai TNW dalam hal pemanfaatan kawasan konservasi. Upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan dibentuknya Forum Kolaborasi Pengelolaan TNW oleh Pemda, namun pendanaan dalam mendukung forum tersebut masih masuk masing-masing SKPD sehingga belum terintegrasi dan bersifat sektoral. Di satu sisi Pemda memiliki kewenangan penuh mengelola daerah, yang terkait dengan SKPD teknis dalam hal pengelolaan wilayah di TNW. Disisi yang lain pengelolaan TNW berada di bawah kementerian kehutanan.

Kelima, promosi wisata perbatasan belum dilakukan secara terencana dan terintegratif. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Dinas Pariwisata Merauke bahwa, walaupun promosi sudah mulai dilakukan namun masih bersifat sporadis dan bersifat sektoral. Oleh karenanya, kepala dinas mengusulkan agar dibentuk badan atau instansi daerah khusus yang menangani masalah promosi.

Keenam, respon dan kultur masyarakat asli kurang mendukung pengembangan wisata di Merauke umumnya dan wisata perbatasan di Sota pada khususnya. hal ini ditunjukkan dengan penolakan atas berbagai upaya perbaikan fasilitas wisata yang dilakukan oleh Balai Taman nasional Wasur. Respon yang kurang baik juga ditunjukkan oleh sikap masyarakat asli yang tidak mengelola fasilitas wisata di sekitar batas negara (titik nol Indonesia), yang telah diserahkan oleh Bapak ma'ruf, sebagai perintis wisata di Sota. Respon negatif dari masyarakat juga disampaikan oleh Kepala Balai TNW bahwa rencana pembangunan dan renovasi berbagai fasilitas wisata seperti tempat penangkaran satwa khas Merauke, tidak bisa dilakukan dengan baik karena adanya protes warga setempat. Hal ini menurut Kepala bidang Pembangunan Ekonomi bappeda disebabkan oleh 2 hal yaitu: pertama, masalah hak ulayat atau kepemilikan tanah oleh warga asli Papua dan pola perilaku dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada alam. Kedua adalah perilaku masyarakat yang masih mengandalkan mata pencahariannya pada apa yang ada di hutan dan tidak melakukan proses produksi, seperti bercocok tanam atau beternak.

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Pilar Utama Model Pengembangan Sota

Ecotourism merupakan wisata alam yang tidak hanya menempatkan alam sebagai obyek untuk dinikmati saja keindahannya dan dimanfaatkan untuk memenuhi kesenangan manusia saja tetapi lebih menempatkan alam sebagai subyek yang sama dengan manusia. Dengan demikian alam berhak mendapat pemeliharaan yang layak dan manusia bertanggung jawab untuk melestarikannya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam definisi yang

dibuat oleh World Conservation Union mendefinisikan *ecotourism* sebagai “ .. *is environmentally responsible travel and visitation to relatively undisturbed natural areas, in order to enjoy and appreciate nature (and any accompanying cultural features – both past and present) that promotes conservation, has low negative visitor impact and provides for beneficially active socio economic involvement of local population*” (wisata yang bertanggung jawab atas lingkungan dan tidak merusak lingkungan alam).

Wisata alam ini ada yang bersifat bawaan artinya memang sudah disediakan alam dan wisata alam yang dibangun oleh manusia (pemerintah atau pihak lain). Wisata alam ini lebih dilihat sebagai sebuah wisata yang tidak hanya memberikan manusia sebuah pemandangan yang indah dan unik saja baik flora maupun fauna, melainkan sebuah wisata yang mendidik dan bertanggung jawab terhadap alam. Maka, di dalam *ecotourism*, wisatawan tidak hanya disugahi oleh keindahan alam dan margasatwa juga tetapi diberikan informasi mengenai segala jenis tanaman dan hewan yang ada di dalam wilayah konservasi serta bagaimana melestarikannya. Dengan demikian, pengelolaan oleh komunitas di sekitarnya menjadi sangat penting demikian pula budaya masyarakat yang ada mesti dapat saling mendukung lingkungan. Hal ini sejalan dengan definisi *ecotourism* sebagai .. *ecologically sustainable, low impact, culturally sensitive, learning oriented and community supporting tourism* (wisata alam merupakan wisata yang secara ekologi berkesinambungan, dampak yang rendah atas lingkungan, bersinggungan dengan budaya, berorientasi pada pembelajaran dan terdukung oleh komunitas yang ada). Atau dengan kata lain, *ecotourism is small scale, compatible with the environment, educational and provides benefits to the community in or close to which it occurs* (wisata lingkungan adalah wisata yang dikembangkan dalam area yang terbatas, saling mendukung dengan lingkungan di sekitarnya, mendidik dan memberikan keuntungan terhadap komunitas terdekat) (Terry L. Johnson. 2008).

Pengembangan Eco Tourism di Sota terdiri dari 2 bentuk yaitu:

Taman Wisata Alam (Taman Nasional Wasur)

Sota yang menjadi bagian dari Taman Nasional Wasur merupakan bagian dari wahana riset yang dikembangkan oleh Taman Nasional Wasur. Pada kawasan ini dapat ditemukan:

Musamus sebagai ikon Ecotourism Sota

Musamus kadangkala juga disebut dengan rumah semut meskipun sesungguhnya yang membangunnya bukan semut namun salah satu dari jenis rayap. Mereka membangun istana tersebut dengan menggunakan bahan dasar tanah, rumput kering, dan air liur sebagai perekatnya. Yang istimewa dari Musamus ini adalah rancangan ventilasinya yang berupa lorong-lorong, sehingga membuat semut terlindungi dari air hujan. Selain itu, lorong-lorong ini juga berfungsi melepas panas ke udara ketika musim panas tiba. Musamus hanya ditemukan di tempat-tempat tertentu di dunia, dan salah satunya ada di Merauke. Oleh karena itu, Musamus dijadikan lambang Kabupaten Merauke.



Pelestarian Flora dan Fauna Langka

Terdapat 3 jenis satwa (Fauna) langka yang merupakan ciri khas Merauke, yaitu Kanguru, Rusa, Burung Kasuari dan Buaya. Namun keberadaan satwa langka tersebut saat ini sudah sangat sedikit dan relatif hampir punah. Menurut Kepala Balai TNW, Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi Bappeda, Kepala Dinas Pariwisata serta perintis wisata di Merauke, Bapak Ma'ruf mengemukakan bahwa satwa-satwa langka tersebut khususnya kanguru sudah sulit ditemui disepanjang jalan dari Merauke menuju Sota yang melewati TNW. Kondisi ini berbeda ketika 10 atau 20 tahun yang lalu. Mulai punahnya satwa-satwa langka ini sebagai akibat dari pembukaan kawasan perbatasan, maraknya illegal logging dan perburuan yang dilakukan oleh masyarakat asli Papua. Seperti halnya fauna, Merauke juga memiliki flora yang khas seperti jenis anggrek, tanaman obat-obatan yang bisa dikemas untuk menarik wisatawan berkunjung ke Sota.

Taman Wisata Buatan: Transit Area

Yang dimaksud taman wisata buatan adalah fasilitas atau tempat wisata yang sengaja dibangun oleh pemerintah atau pihak lainnya yang diimaksudkan untuk tujuan atau sebagai objek wisata. Salah satu taman wisata buatan yang hari disiapkan oleh pemerintah Merauke di Sota adalah taman wisata yang berbentuk kawasan transit area. Hal ini mengingat Sota sebagai wilayah transit menuju ke beberapa kabupaten pemekaran.

Di wilayah dekat dengan perbatasan Sota (dekat dengan pasar) juga merupakan wilayah transit bagi warga dan para pedagang yang akan pergi ke Distrik Muting atau Ulilin atau bahkan hendak ke Kabupaten Boven Digoel serta pegunungan Bintang. Jalan nasional yang ditargetkan selesai tahun 2013 akan sangat membantu warga untuk mengakses wilayah yang sulit dijangkau dan terpencil serta sangat tergantung oleh cuaca. Sebelum ada jalan yang dibangun, Merauke – Boven Digoel hanya bisa dijangkau dengan kuda yang membutuhkan waktu satu minggu. Saat ini untuk mencapai Boven Digoel, warga harus mengendarai mobil beroda besar dengan tarif sekitar Rp.700.000,- per orang atau 8 sampai 10 juta untuk menyewa satu buah modil beroda besar. Perjalanan akan membutuhkan waktu tempuh sekitar 8 jam tergantung cuaca. Dan biasanya dari dan ke Boven Digoel mereka selalu transit di Sota yang menyediakan warung makan, pasar dan juga poma bensin. Sebagai wilayah transit ini, Sota memiliki potensi sebagai simpul aglomerasi ekonomi jika didukung dengan infrastruktur yang baik.

Bappeda Merauke juga akan melakukan beberapa upaya dalam rangka mengembangkan eko wisata, seperti yang tertuang dalam Laporan Grand Desain Eko Wisata di Sota (tahun 2012) seperti Pembangunan Honay atau tempat berteduh dan penjualan Souvenir serta perluasan dan peningkatan pasar lokal. Honay berfungsi ganda yakni sebagai tempat berteduh bagi wisatawan terutama pada musim hujan, sekaligus sebagai tempat penjualan oleh-oleh khas Merauke dan souvenir. Bangunannya berupa kios yang dibangun disisi kiri dan kanan jalan poros utama menuju ke gerbang perbatasan. Bangunan kios dirancang sedemikian rupa sehingga setiap unit bangunan bisa menampung oleh-oleh khas Merauke dan souvenirnya.

Perluasan dan peningkatan kapasitas pasar lokal yang menampung dan menjual produk-produk pertanian pola pekarangan dan kumbili serta mampu melayani kebutuhan wisatawan domestik dan asing (terutama PNG) selama hari pasar wisata 1-2 hari/minggu. Pasar lokal sangat berarti sebagai penyerap hasil-hasil pertanian dari masyarakat setempat baik yang diusahakan dengan sistem pola pekarangan ataupun lokasi lainnya, bahkan hasil-hasil hutan di sekitar lokasi ekowisata. Konsekuensinya, diperlukan tindakan "grading" untuk memilah kualitas hasil pertanian atau hutan yang sesuai untuk level pasar lokal dan pasar ekowisata.

Hal lainnya adalah diperlukannya perluasan dan peningkatan kapasitas pasar lokal agar mampu melayani kebutuhan wisatawan di saat hari pasar wisata dengan periode waktu 1-2 hari/minggu, selain menampung produk-produk pertanian pada hari selain hari pasar wisata tersebut. Hari pasar ditentukan 1-2 kali/minggu misalnya hari Sabtu dan Minggu dimana wisatawan biasanya punya waktu luang untuk berekreasi untuk mengisi waktu luang bersama keluarga.

Terdapat beberapa bentuk *Culture Tourism* yang bisa dikembangkan di Sota, yaitu:

a. *Traditional Cross Border Market* / Pasar Tradisional Lintas Batas.

Pasar tradisional merupakan tempat dimana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan aktifitas jual beli. Pada pasar perbatasan, penjual dan pembeli merupakan warga dari dua negara yang berbeda. Kondisi alam yang cukup sulit dan pembangunan yang belum maju membuat perdagangan berada dalam situasi yang masih tradisional. Artinya penjual dan pembeli saling bertemu untuk berjual beli. Dalam “*Special Traditional and Customary Border Crossings between The Government of the Republic Indonesia and the Government of Papua New Guinea*” 15 November 1993, perdagangan perbatasan tradisional adalah:

- (a) Perdagangan perbatasan tradisional adalah perdagangan yang dilaksanakan antar penduduk perbatasan dalam daerah perbatasan sejak dahulu kala; dan
- (b) Perdagangan kebiasaan yang telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir ini untuk memenuhi kebutuhan penduduk perbatasan.

Pasar tradisional di kawasan perbatasan Sota merupakan pasar yang cukup unik yang biasanya terselenggara pada akhir pekan. Warga Papua Nugini yang biasanya bertempat tinggal di seida perbatasan Weam dan Morehead berdatangan ke perbatasan Sota untuk menjual hasil bumi dan kerajinan mereka. Meski demikian, kedatangan mereka di Sota tidak semata-mata untuk melakukan aktifitas ekonomi tetapi juga sosial, karena kekerabatan mereka cukup dekat. Hasil bumi yang biasanya mereka jual berupa madu dan daging kasuari atau kanguru. Sedangkan kerajinan tangan yang biasanya mereka bawa untuk dijual di Sota adalah alat perkebunan seperti parang dan cangkul.

Pelestarian Budaya Bertanam Kumbili

Dalam laporan Bappeda tentang Grand Desain Eko Wisata Sota (tahun 2012), telah diuraikan Pelestarian budaya bertanam kumbili dan rumah penyimpanan hasil panen kumbili yang merupakan komoditas khas kawasan perbatasan Sota. Tanaman kumbili (sejenis umbi) merupakan budaya khas masyarakat Sota sehingga dapat sistem budidaya kumbili dapat dikategorikan sebagai salah satu kearifan lokal yang harus dilestarikan (Gambar 6). Secara tradisional, petani menanam kumbili dengan cara menggali lubang tanam sekitar 20-30 cm dengan jarak tanam yang tidak teratur. Diameter lubang sekitar 0,5 meter dimana tanah bagian atas yang subur dikumpulkan di sebelah lubang tanam. Pada setiap 1 lubang ditanam 2-3 benih (umbi) kumbili yang sudah tumbuh selama penyimpanannya di rumah simpan, kemudian lubang ditutup dengan tanah yang subur (lapisan tanah bagian atas yang dikumpulkan di sekitar lubang tanam). Setelah benih tumbuh dimana batangnya merayap maka dipasang ajir untuk menjalarkan batang kumbili. Petani tidak pernah memberikan pupuk buatan (N, P, K) atau menyemprot dengan pestisida terhadap kumbili ini.

Secara tradisional, petani membuat rumah penyimpanan hasil panen kumbili dari bahan-bahan yang sederhana yang diperoleh dari alam sekitarnya. Ukuran rumah kumbili ini sekitar 4 x 6 meter, dindingnya terbuat dari batang kayu, ditancapkan seperti pagar dengan tinggi sekitar 1 meter. Atapnya terbuat dari kulit kayu *Eucalyptus* atau daun pandan yang dianyam sedemikian rupa sehingga tidak tembus air hujan. Umbi kumbili yang sudah dipanen disimpan pada rumah ini, sekitar 1-2 bulan sudah tumbuh, kemudian ditanam lagi di lapangan. Waktu simpan benih maksimal 3 bulan dan sesudahnya bisa dikonsumsi.

Yang perlu diinovasikan dalam budidaya kumbili ini adalah cara budidayanya antara lain: lubang tanam dibuat lebih dalam, diameter lebih lebar, pupuk kompos/organik yang

lebih banyak agar tanaman tumbuh lebih subur. Bahan kompos dari hasil sisa tanaman atau mengumpulkannya dari serasah tanaman disekeliling kebun ataupun membuat kompos dengan dekomposer yang efektif dalam merombak serasah sehingga kompos lebih berkualitas. Jarak tanam juga diusahakan teratur sehingga populasinya lebih tinggi untuk memperoleh hasil yang lebih banyak.

b. Optimalisasi dan peningkatan kegiatan budaya masyarakat asli

Kekayaan budaya masyarakat yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari menyangkut cara bercocok tanam, tari-tarian, peringatan hari-hari bersejarah, dan lain-lain adalah salah satu materi yang sangat potensi sebagai promosi obyek wisata alam seperti di Sota ini. Kasus terkenal Bali sebagai pulau Dewata, sangat didorong oleh pertunjukkan kesenian tari, cara bercocok tanam (sistem Subak), yang dikemas dengan rapi dan menarik. Penggalan dan penggalakan kesenian daerah, sistem bercocok tanam daerah, dan lain-lain yang dipertunjukkan secara reguler di gedung serbaguna atau tempat lainnya bisa mendorong promosi wisata alam Sota (Laporan Bappeda, 2012)

Kepala Dinas Pariwisata Merauke telah menjelaskan arah pengembangan wisata di Merauke (hasil wawancara tanggal 18 Agustus 2014 di Merauke). Pemerintah daerah Merauke telah membagi 3 wilayah pengembangan wisata yang didasarkan pada sebaran penduduk asli, yaitu:

- 1) Wilayah daerah pesisir
- 2) Wilayah perbatasan
- 3) Wilayah pulau/rawa

Sebagai contoh, di wilayah pulau akan diadakan festival Dambu di Pulau Kimam, sebagai tempat tinggal suku asli Marind. Festival ini menggambarkan tentang keunggulan pertanian dengan menggunakan kearifan lokal dan teknologi sederhana dengan hasil panen yang super atau baik. Contoh teknologi sederhana adalah dalam waktu penanaman dengan melihat waktu yang tepat melalui posisi matahari dan dengan media tradisional. Dalam festival ini bagi laki-laki, menunjukkan hasil karya pertanian seperti ubi dan ubi jalar. Sedangkan untuk perempuan menunjukkan hasil kerajinan yang terbuat dari bahan rumput rawa yang memiliki kualitas ekspor. Festival ini merupakan bagian dalam rangka memperkuat ketahanan budaya Marind.

Contoh budaya khas lainnya yang ada di wilayah perbatasan adalah tarian Etor yaitu tarian yang menggunakan mulut dan tepuk tangan. Festival di Sota sendiri, sudah ada beberapa pesta budaya masyarakat kanum dan Yenon, yang masih bersifat tradisional. Sedangkan untuk wilayah perbatasan akan diadakan “Festival Daerah Perbatasan Sota (RI-PNG)”. Festival ini sudah didaftarkan kepada kementerian pariwisata, dan ekonomi kreatif. Saat ini akan dilakukan pembahasan tokoh adat, intelektual untuk mengamankan kegiatan festival perbatasan, yang direncanakan akan diadakan bersamaan dengan waktu panen ubi jalar.

Pilar Pendukung Model Pengembangan Sota

Menurut Crozier pariwisata yang memakai alam sebagai modal utama biasanya salah satunya dicirikan dengan banyaknya lahan persawahan, hutan, gunung atau padang. Sementara penduduk yang tinggal di wilayah tersebut menggantungkan hidupnya dari persawahan atau hutan sebagai sumber konsumsi atau aktifitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari lainnya (Crozier, 2011). Turisme yang menawarkan alam sebagai tujuan utama pariwisata biasanya juga menawarkan budaya masyarakat yang tinggal pada wilayah tersebut serta nilai-nilai dan kepercayaan yang mereka anut sebagai bagian dari tujuan pariwisata yang disebut juga dengan *cultural tourism* atau wisata budaya.

Namun demikian, kondisi alam dan penduduk kadangkala tidak selalu sejalan dengan pengembangan industri pariwisata yang sedang dibangun. Minimnya pengetahuan, terbatasnya pendidikan dan ketrampilan dalam industri pariwisata menjadi tantangan

tersendiri untuk mengembangkan industry pariwisata ini. Kadangkala pula, ada sekelompok masyarakat tidak selalu memberi dukungan terhadap pembangunan industry pariwisata di wilayahnya. Dalam sebuah pembangunan kawasan menjadi sebuah kawasan industry pariwisata tentu ada kelompok yang mendukung ada pula yang menentang. Mereka yang mendukung ada yang menyebutnya sebagai kelompok “haters” (Jiaying Zhang, Robert J. Inbakaran dan Mervyn S. Jackson. 2006). Biasanya mereka tidak bersedia menunjukkan perilaku yang ramah kepada para pendatang atau wisatawan. Hal-hal semacam ini tidak akan mampu menjadi faktor yang dapat mendukung keberlanjutan dari pembangunan industry pariwisata dengan cukup baik.

Perilaku yang tidak bersahabat pada pengembangan industry pariwisata terutama bagi pengembangan kawasan ecotourism dan cultural tourism selain menghambat pengembangan industry tersebut, hal tersebut juga dapat menghambat pembangunan kawasan itu sendiri. Potensi konflik bahkan mungkin terjadi jika masyarakat tidak memberikan respon positif terhadap pengembangan industry pariwisata ini. Seperti yang ditengarai oleh Tajudin bahwa sumber konflik diakibatkan karena adanya perbedaan persepsi, perbedaan pengetahuan, perbedaan tata nilai, perbedaan kepentingan dan perbedaan kepemilikan (Palma, Tanpa Tahun).

Program pemberdayaan sudah mulai dilakukan oleh Taman Nasional Wasur dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat. Peran penting pemberdayaan ini, telah dipertegas oleh seluruh pejabat terkait yang diwawancarai dimana program pendampingan menjadi program pembangunan penting di Papua. Beberapa pejabat tersebut adalah Kepala Distrik Sota, Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi Bappeda Merauke, Kepala Balai Taman Nasional Wasur dan Kepala Dinas Pariwisata Merauke. Pemberdayaan masyarakat melalui program pendampingan selain bisa dilakukan oleh LSM atau lembaga pemerintah seperti diuraikan di atas. Pemberdayaan juga bisa dilakukan oleh perguruan tinggi, yang salah satu dharmanya adalah pengabdian kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam program pemberdayaan maka diperlukan kemitraan dari berbagai stakeholders. Oleh karenanya pemberdayaan atau pendampingan bisa dilakukan dengan dua bentuk kemitraan yaitu:

- 1) Kemitraan antara pemerintah daerah, Tokoh adat atau tokoh agama serta Lembaga Swadaya Masyarakat.
- 2) Bentuk kemitraan kedua adalah kemitraan antara pemerintah daerah, tokoh adat atau tokoh agama serta Lembaga Swadaya Masyarakat.

Kedudukan dan peran stakeholders tersebut dalam pemberdayaan masyarakat sangat penting. Hal ini disebabkan keempat stakeholders tersebut memiliki kemampuan dan kredibilitas. Pemerintah merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam program pembangunan baik fisik maupun non fisik (pemberdayaan). Tokoh adat dalam sistem kemasyarakatan di Papua masih sangat menentukan kebijakan yang akan diambil oleh suku atau kelompoknya. Suaranya sangat didengar dan menentukan arah suku dan kelompoknya. Pendekatan melalui tokoh adat atau agama, akan sangat membantu program pemberdayaan atau pendampingan masyarakat asli. LSM merupakan organisasi non profit yang memiliki jiwa sosialnya yang tinggi dan memiliki tugas utamanya adalah melakukan edukasi langsung ke masyarakat dan advokasi kepada pemerintah apabila dirasa kebijakan yang dibuat merugikan masyarakat. Sedangkan perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan yang memiliki kemampuan teoritik dan keharusan melaksanakan program pemberdayaan sebagai bentuk dharma ketiga yaitu pengabdian kepada masyarakat (selain dharma pendidikan dan penelitian).

Promosi yang terintegratif

Promosi merujuk pada aktifitas komunikasi dari pemasaran. Secara umum, kegiatan yang dilakukan promosi bertujuan untuk menghilangkan gap yang dihasilkan dari persepsi

yang didapat oleh calon wisatawan dan informasi yang disediakan oleh penyedia layanan wisata (Basse Benjamin Esu, 2010). Sedangkan mengacu pada Sambhanthan, promosi adalah proses untuk memulai, membesarkan dan menjaga komunikasi interaktif dengan pasar dan mengelola hubungan dengan konsumen dalam waktu yang lama bahkan hingga waktu konsumen sedang memepergunakan produk dan pasca memepergunakan produk (Sambhanthan, Tanpa Tahun). Strategi promosi dikontrol melalui metode komunikasi yang integrativ serta materi yang didesign untuk dapat mempresentasikan produk yang hendak ditawarkan kepada consumer serta menjaga agar produk wisata selalu mendapat tempat pada pasar pariwisata. Promosi pariwisata harus dapat memenuhi keinginan atau tujuan wisata dari calon wisatawan dengan memberikan layanan yang baik berupa pengalaman wisata yang mereka harapkan. Oleh karenanya, survey terhadap opini wisatawan dan trend pasar pariwisata menjadi hal penting dalam promosi wisata.

Esu dalam risetnya menilai bahwa mengidentifikasi dorongan berwisata berkaitan erat dengan pembentukan pilihan-pilihan promosi wisata (Basse Benjamin Esu, 2010). Esu meyakini bahwa setiap kontak yang dibuat dengan konsumen akan memberikan masukan atau kontribusi penting pada pengelolaan pariwisata. Sejalan dengan hal tersebut, Sambhanthan berpendapat komunikasi yang terus menerus perlu dibangun untuk memupuk kepercayaan konsumen terhadap produk (Sambhanthan, Tanpa Tahun). Mengetahui potensi dan profil wisatawan yang memiliki ketertarikan pada wisata lingkungan dan budaya akan sangat membantu dalam menentukan pilihan promosi wisata.

Promosi wisata dibuat untuk tujuan: Membangun kesadaran dan ketertarikan terhadap tempat tujuan wisata dan atraksi serta produk yang dihasilkan dari tempat tujuan wisata tersebut, menunjukkan keunikan atau kelebihan dari tempat tujuan wisata yang lain, mengomunikasikan dengan baik keuntungan yang didapat oleh wisatawan baik keuntungan secara fisik maupun psikis apabila berkunjung ke tempat tujuan wisata tersebut, membangun dan menjaga image dan reputasi tempat tujuan wisata, mempengaruhi wisatawan untuk mengunjungi tempat wisata dan tinggal lebih lama, promosi dapat membangun menata jadwal kedatangan wisatawan pada masa masa tertentu seperti masa-masa liburan (Basse Benjamin Esu, 2010).

Guna dapat memenuhi tujuan-tujuan tersebut ada beberapa alat yang dapat dipakai sebagai alat promosi. Alat-alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan promosi pariwisata tersebut antara lain: pertama, advertising, dengan memperhatikan beberapa hal yaitu strategi yang kreatif dalam menyusun advertising, bagaimana pesan disampaikan dan bagaimana pesan tersebut didengar oleh konsumen. Merujuk pendapat Vagionis, *film tourism* atau yang juga dikenal sebagai *film induced tourism* adalah turisme yang tumbuh karena adanya film yang mepergunakan latar belakang sebuah kawasan dalam pembuatannya. Dengan begitu, kawasan tersebut menjadi sangat dekat dengan masyarakat yang menyaksikannya bahkan terinspirasi oleh kawasan yang dipakai tersebut (Vagionis, 2011). Kedua, Public Relation juga merupakan fungsi komunikasi yang dapat dipergunakan sebagai alat promosi pariwisata. Public relation merujuk pada upaya yang dibangun untuk menjaga saling kesepahaman antara sebuah institusi dan penggunanya. Di dalam misinya tersebut, public relation memiliki sebuah fungsi dimana ia harus melakukan evaluasi terhadap perilaku konsumen dan mengevaluasi kebijakan institusi agar sejalan dengan kepentingan, kebutuhan dan ketertarikan konsumen. Ketiga, Sales Promotion yaitu kegiatan pemasaran yang menyediakan nilai tambah atau insentif kepada tenaga pemasar, atau distributor atau konsumen sendiri. Keempat, Personal Selling merupakan komunikasi dari satu orang ke orang yang lain secara langsung. Namun demikian, pada era sosial media dewasa ini sesungguhnya personal selling telah semakin dimudahkan oleh teknologi dan sediaan layanan sosial media lewat internet. Ada banyak website yang dapat melayani komunikasi interaktif secara langsung antara

penyedia jasa dengan konsumen yang membutuhkan informasi lebih lengkap mengenai tempat-tempat wisata yang ingin ditujunya.

Merujuk prof. Dr. Mustafa Boz, social media marketing adalah proses promosi bisnis melalui jalur media sosial yang mampu menarik perhatian konsumen secara cepat dan dalam jumlah yang besar karena tingginya traffic yang terjadi melalui media internet. (Prof. Dr. Mustafa Boz, Tanpa Tahun). Berkembangnya media sosial memberi perubahan cukup besar dalam kehidupan manusia termasuk dalam mengakses informasi pariwisata. Pada risetnya Boz menemukan ada kenaikan yang cukup signifikan pada pariwisata di Queensland ketika di unggah melalui internet, apakah itu dengan membuat website khusus yang menyediakan layanan informasi mengenai tempat wisata dan informasi hotel serta transportasinya tetapi juga ketika kawasan wisata di unggah ke dalam you tube. Saat ini, keindahan Taman Nasional Wasur telah dapat di telusur melalui google dari berbagai website. Melalui <http://www.travelesia.com> dan juga laman facebook “Taman Nasional Wasur Merauke”. Tanya jawab mengenai Wasur dapat dilakukan. Informasi mengenai Taman Perbatasan Sota dan Weam pun telah dapat ditemukan melalui internet yang diunggah oleh mereka yang pernah mengunjungi kawasan tersebut melalui blog-blog yang mereka miliki. Akan sangat baik jika pemerintah daerah secara khusus bersama-sama dengan Dinas Pariwisata mengelola website mengenai pariwisata di Merauke dengan lebih intensif. Selalu mengunggah informasi mengenai pariwisata Merauke melalui televises dan website khusus pariwisata akan cukup membantu mengenalkan kawasan ini kepada masyarakat luas.

Dalam mengamati peran promosi dalam pengembangan wisata di Sota khususnya dan umumnya di Merauke, kepala Dinas Pariwisata Merauke melihat adanya kelemahan promosi wisata di Merauke. Lebih lanjut disebutkan bahwa hal ini disebabkan oleh belum adanya badan promosi wisata daerah yang mandiri dan otonom. Promosi hanya dilakukan oleh bagian-bagian dari SKPD terkait dan tidak terintegrasi. Idealnya, untuk memajukan wisata Merauke perlu ada badan promosi wisata daerah yang kedudukannya sebagai mitra dalam berkordinasi dengan pemerintah daerah (hasil wawancara tanggal 18 Agustus 2014).

Pembangunan Sarana dan Prasarana pendukung

Industri pariwisata merupakan industri yang sangat potensial meskipun di negara yang paling miskin sekalipun. Riset Jintranun et. all menunjukkan bahwa industry pariwisata di Thailand tidak saja berhasil memberikan kenaikan income perkapita tetapi juga berhasil menyerap tenaga kerja lebih banyak (Jintranun et. all, 2012). Namun demikian, industry ini memerlukan dukungan sarana dan prasaran yang baik, antara lain infrastruktur jalan sebagai penghubung antara kawasan, sarana transportasi atau angkutan yang dapat membawa wisatawan berkunjung ke kawasan wisata serta fasilitas penginapan.

a. Infrastruktur jalan

Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) telah menyelesaikan jalan Trans Papua sepanjang 426 km yang menghubungkan Kabupaten Merauke dan Kabupaten Boven Digoel pada tahun 2013. Dengan demikian, jarak tempuh yang tadinya bisa membuyuhkan waktu hingga dua minggu karena beratnya medan, saat ini dapat ditempuh hanya dalam waktu 10-8 jam saja. Khusus pembangunan proyek di jalan lintas Merauke – Boven Digoel menyerap anggaran APBN untuk penanganan dan jembatan di Merauke senilai Rp 414 milyar, dan anggaran APBN-P sebesar Rp 104,3 milyar. Sedangkan untuk wilayah Boven Digoel telah disediakan anggaran APBN sebesar Rp 125,5 Milyar dan APBN-P sebesar Rp. 179,9 Milyar. UP4B juga memprakarsai terhubungnya jalan dari Kabupaten Boven Digoel menuju Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang sepanjang 206 kilometer. Direncanakan tahun 2014 dua kabupaten ini sudah akan terbuka dengan pembangunan beraspal. Sampai saat ini, telah dilakukan pekerjaan pembangunan jalan Boven Digoel – Mindiptana,

Mindiptana – Waropko, Waropku – Iwur, dan Iwur – Oksibel. Terbukanya kawasan ini semakin meningkatkan mobilitas penduduk dari Merauke ke Boven Digoel.

b. Transportasi dan Penginapan

Transportasi di Kota Merauke sudah cukup baik dengan tersedianya beberapa sarana angkutan dalam kota Merauke dan angkutan yang menghubungkan beberapa daerah di Merauke. Adapula taxi dan mobil sewa harian/carter yang dapat mengantarkan ke berbagai tujuan. Untuk menuju Sota dari Kota Merauke, selain dengan taxi atau mobil carter ada pula bis beroda 6 yang menghubungkan Kota Merauke, Sota, Semangga dan Jagebob. Sementara itu untuk menuju daerah yang lebih jauh di luar Merauke seperti Boven Digoel dan daerah lain yang kondisi jalannya masih sulit ditembus oleh kendaraan biasa, maka sudah tersedia mobil offroad (seperti Hardtop, Hiline, Double Cabin) yang dapat disewa (Website Resmi Pemerintah Daerah Kota Merauke, <http://www.merauke.go.id/portal/news/view/62/bandar-udara.html>). Namun, dengan terbangunnya jalan yang lebih baik dari Merauke ke Boven Digoel mengkhawatirkan penyedia jasa mobil off road ini karena jalan yang ada telah memungkinkan kendaraan non off road mampu melintasi jalan.

Di wilayah dekat dengan perbatasan Sota (dekat dengan pasar) juga merupakan wilayah transit bagi warga dan para pedagang yang akan pergi ke Distrik Muting atau Ulilin atau bahkan hendak ke Kabupaten Boven Digoel serta pegunungan Bintang. Jalan nasional yang ditargetkan selesai tahun 2013 sangat membantu warga untuk mengakses wilayah yang sulit dijangkau dan terpencil serta sangat tergantung oleh cuaca. Sebelum ada jalan yang dibangun, Merauke – Boven Digoel hanya bisa dijangkau dengan kuda yang membutuhkan waktu satu minggu. Saat ini untuk mencapai Boven Digoel, warga harus mengendarai mobil beroda besar dengan tarif sekitar Rp.700.000,- per orang atau 8 sampai 10 juta untuk menyewa satu buah mobil beroda besar. Perjalanan akan membutuhkan waktu tempuh sekitar 8 jam tergantung cuaca. Dan biasanya dari dan ke Boven Digoel mereka selalu transit di Sota yang menyediakan warung makan, pasar dan juga pompa bensin. Sebagai wilayah transit ini, Sota memiliki potensi sebagai simpul aglomerasi ekonomi jika didukung dengan infrastruktur yang baik.

Akan sangat jauh lebih baik jika pemerintah daerah menyediakan transportasi yang lebih baik dan secara regular melayani penduduk yang hendak pergi menuju dan dari Sota ke daerah-daerah lain terutama ke Kota Merauke. Dengan adanya transportasi yang lebih baik dan dalam waktu yang lebih sering, maka kegiatan ekonomi akan menjadi lebih mudah dilakukan. Tingkat kunjungan ke Sota pun juga lebih dapat ditingkatkan. Beberapa wisatawan yang datang berkunjung ke Sota lebih banyak mempergunakan kendaraan pribadi atau kendaraan carter yang mereka dapatkan di Kota Merauke.

Sementara itu transportasi menuju Merauke sendiri disediakan oleh beberapa maskapai penerbangan seperti Merpati Airlines, Batavia Air, Lion Air, Express Air dan MAF. Untuk penyedia layanan penginapan, Kota Merauke telah menyediakan beberapa hotel yang telah cukup representative, yaitu: Swiss Bell Hotel, Hotel Nirmala, Hotel Megaria, Hotel Itese, Hotel Flora, Hotel Asma, Hotel Akat, Hotel Izakod, Hotel Marind, Hotel Nakoro, Hotel Rose Permai, Hotel Royal, Hotel Solair Indah. Sementara di Taman nasional Wasur hanya terdapat 3 penginapan yang dikelola sendiri oleh masyarakat sekitar taman nasional. Sehingga, bagi mereka yang ingin berkunjung di Sota dari Merauke biasanya membutuhkan waktu kurang lebih satu jam dengan kendaraan mobil. Baik penyedia layanan transportasi udara dan hotel di Merauke merupakan partner yang cukup baik bagi pemerintah Kota Merauke untuk meningkatkan jumlah kunjungan ke Merauke dengan menawarkan potongan harga yang menarik bagi konsumen.

Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Wisata Perbatasan. Seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya (masalah dalam pengembangan wisata perbatasan Sota) Salah satu

masalah dalam pariwisata serta pengelolaan wilayah perbatasan adalah karena faktor kebijakan yang belum terintegrasi dan lebih bersifat sektoral. Hal ini telah dikemukakan oleh Kepala BPPD Merauke, Kepala Dinas Pariwisata Merauke, Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi Bappeda Merauke serta Kepala Distrik Sota Merauke. Oleh karenanya sebuah wilayah atau kabupaten atau propinsi yang akan mengembangkan wilayahnya, khususnya untuk pengembangan wisata perbatasan (karena berbeda karakteristiknya dengan wilayah non perbatasan negara) harus memiliki kejelasan dalam hal:

Kebijakan pengembangan wisata perbatasan harus terumuskan dengan jelas dan terukur dalam hal arah dan tujuannya.

Kaitannya dengan kebijakan wisata di kabupaten Merauke, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dinas pariwisata, dikatakan bahwa Merauke belum memiliki Rencana Induk Pengembangan Pariwisata dan Peraturan daerah tentang pariwisata. Berdasarkan uraian di atas, dimana border tourism terdiri dari eco tourism dan cultur tourism, maka model pengembangan wisata perbatasan Sota adalah “Model Pengembangan Wisata Perbatasan yang Berbasis pada Penguatan atau peningkatan Kualitas Karakteristik Kondisi Alam dan Masyarakat Lokal”. Dalam memvisualisasikan uraian di atas, dibawah ini terdapat gambar model tersebut.

Selain kebijakan pemerintah daerah yang mendukung pengembangan wisata perbatasan, namun juga perlu ada penguatan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Papua Nugini dalam mempercepat pembukaan jalan dari Papua Nugini menuju perbatasan Sota. Timothy (dalam Crozier, 2011) menyatakan bahwa salah satu kunci dari suksesnya sebuah industri border tourism adalah kerjasama yang dibangun antara kedua belah pihak/negara yang berseberangan. Timothy mengklasifikasikan 5 tahapan kerjasama dalam tourism berdasar atas pembentukan kerjasama yang dibuat: *alienation*, *coexistence*, *cooperation*, *collaboration*, *integration*. Alienation terjadi dimana kerjasama minim sekali terjadi antara dua negara. Wilayah border rawan dengan konflik dan separatisme, oleh karenanya perlu kerjasama antara kedua negara untuk menanggulangi persoalan yang ada pada wilayah perbatasan. Coexistence menunjukkan kondisi yang minimal pada level kerjasama wilayah tetangga. Kerjasama yang dibentuk cenderung untuk mentolerir persoalan-persoalan perbatasan yang muncul perbatasan. Cooperation adalah situasi dimana ada upaya yang saling membantu untuk menyelesaikan masalah bersama. Sementara itu, Collaboration merujuk pada kondisi dimana ada hubungan yang stabil dan upaya bersama dalam menangani persoalan yang terjadi pada perbatasan negara. Sedangkan Integration menggambarkan sebuah keadaan dimana batasan tidak lagi benar-benar ada di antara negara. Kedua negara bekerja sama mengelola perbatasan negara dengan merendahkan level kedaulatannya masing-masing.

Pada pengelolaan perbatasan Indonesia dan PNG telah disepakati bersama mengenai pelintas batas dan perdagangan tradisional melalui *Special Arrangements For Traditional and Customary Border Crossings between The Government of the Republic of Indonesia and The Governement of Papua New Guinea 1993*. Hal ini dilakukan karena baik Indonesia dan PNG mengakui dan mengizinkan pergerakan melintasi perbatasan antar negara yang dilakukan oleh penduduk tradisional. Karena kelahiran atau perkawinan masyarakat ini secara tradisional melakukan kegiatan melintasi perbatasan. Kegiatan tradisional yang dimaksud meliputi hubungan sosial dan upacara-upacara termasuk perkawinan, berkebun, berburu, pengumpulan dan penggunaan tanah, penangkapan ikan dan penggunaan perairan, perdagangan perbatasan' olahraga, serta kegiatan kebudayaan (Staf Ahli Menteri Negara PPKTI dan Kawasan Tertinggal, Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2003. *Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kontinental*. Buku 2).

Mengingat kawasan tersebut merupakan kawasan yang tidak saja memiliki kedekatan kekerabatan, tetapi juga memiliki kedekatan ekonomi maka pada perbatasan ini diberlakukan pas lintas batas yang dapat diminta pada kepala desa saja. Kebijakan ini cukup banyak membantu penduduk di perbatasan terutama penduduk di desa Weanm dan Morehead di Papua Nugini yang masih sangat tergantung dengan barang-barang kebutuhan pokok dari Indonesia. Maka, melalui kesepakatan tersebut keduanya memberikan kelonggaran kepada penduduk pada distrik yang dimaksud untuk menyelenggarakan perdagangan tradisional.

Perdagangan Perbatasan Tradisional dan kebiasaan adalah:

- (a) Perdagangan perbatasan tradisional adalah perdagangan yang dilaksanakan antar penduduk perbatasan dalam daerah perbatasan sejak dahulu kala; dan
- (b) Perdagangan kebiasaan yang telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir ini untuk memenuhi kebutuhan penduduk perbatasan (*Special Arrangements For Traditional and Customary Border Crossings between The Government of the Republic of Indonesia and The Government of Papua New Guinea 1993*).

Terkait dengan semakin berkembangnya taman perbatasan yang dikembangkan oleh penjaga perbatasan maka kawasan perbatasan menjadi kawasan yang semakin ramai oleh pengunjung yang tidak saja ingin melihat Taman Nasional Wasur tetapi juga keunikan perdagangan tradisional yang terjadi di seputar taman perbatasan. Perlu kiranya ditingkatkan kerjasama dengan pemerintah Papua Nugini dalam hal infrastruktur jalan agar pelintas batas tradisional dari Papua Nugini mendapatkan kemudahan untuk dapat tiba di wilayah Indonesia. Peningkatan pelintas batas tradisional akan mendorong kegiatan ekonomi semakin tinggi jumlahnya sekaligus meningkatkan daya tarik perlintasan batas sebagai tempat terjadinya perdagangan tradisional antara penduduk Sota, Indonesia dan Weam Papua Nugini. Tingginya kegiatan ekonomi akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Pihak Indonesia sendiri telah mendesak pemerintah Papua Nugini untuk membangun jalan tersebut pada rapat Border Leasing Meeting (BLM) di Medan, Sumatera Utara. Wakil Bupati Merauke, Sunarjo mengatakan, pemerintah daerah akan memberikan penekanan pada rapat lanjutan yang akan datang. Indonesia sudah merealisasikan komitmennya untuk membangun jalan di perbatasan. Realisasi itu atas kerjasama Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat dengan membangun jalan di wilayah Sota.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan border tourism di Sota didasarkan pada 2 pilar utama yaitu Eco Tourism dan Culture Tourism yang didukung dengan 4 pilar (pemberdayaan masyarakat, promosi yang integratif, pembangunan sarana prasarana pendukung wisata serta kebijakan pemerintah daerah yang mendukung pengembangan wisata), maka yang perlu mendapatkan perhatian utama adalah adanya arah kebijakan dan roadmap pengembangan wisata perbatasan yang bersifat lintas sektoral dan integratif serta mengoptimalkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat sekitar tentang pentingnya masyarakat dalam pengembangan wisata perbatasan di Sota, karena wisata di Sota berbasis pada masyarakat (aspek sosial dan budaya) dan berbasis pada lingkungan (taman nasional wasur). Wilayah Sota memiliki karakteristik khusus yang berbatasan dengan Papua Nugini namun kondisi batas wilayah negara tetangga (Papua Nugini) belum memiliki infrastruktur utamanya jalan yang baik. Oleh karenanya pemerintah pusat perlu melakukan kerjasama dengan Papua Nugini untuk membuka jalan dari wilayah perbatasan Papua Nugini ke wilayah Sota.

DAFTAR PUSTAKA

- , “Profil Investasi Kabupaten Merauke Propinsi Papua”. http://www.rummarppub.net76.net/download/BPID_ProfilMerauke.pdf.
- , (2006). “Lokakarya Hasil Identifikasi Tempat Penting Masyarakat Suku Besar Malind Anim dalam Bio-Visi Ecoregion Trans Fly”. Merauke, 19 – 21 Sept 2006. Kerjasama LMA Malind Anim, WWF Indonesia dan Pemkab Merauke.
- , (2012). “Aiptu Ma'ruf Suroto: Menggunakan Gaji Pribadi Untuk Merubah Perbatasan RI – PNG”. <http://www.setkab.go.id/berita-4886-aiptu-maruf-suroto-menggunakan-gaji-pribadi-untuk-merubah-perbatasan-ri-png.html>.
- , (2013). “Nasionalisme di Tapal Batas”. <http://edukasi.kompas.com/read/2013/01/08/02223255/Nasionalisme.di.Tapal.Batas>.
- , (2014). _____. Tanpa Tahun “Border Tourism”.. www2.adb.org/Documents/Reports/Consultant/27626.../annex2.pdf.
- Agung, Y. Agung Widya, S. Hut. (2009). “Pembentukan Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) Kampung Wasur, Taman Nasional Wasur, Merauke”. <http://btnwasur.blogspot.com/2009/02/pembentukan-sentra-penyuluhan-kehutanan.html>.
- BNPP. Tanpa Tahun. *Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di Indonesia Tahun 2011-2025*. <http://potensiperbatasan.info/download/Rencana%20Induk%20BNPP.pdf>.
- Boz, Mustafa, Prof. Dr. Tanpa Tahun. “Successful promotion Strategy in Destination Tourism marketing Through Social Media, Queensland, Australia Case”. http://www.dukagjinicollege.eu/libri/mustafa_boz_duygu_unal.pdf.
- Cimamuya, Julius. (2012). “Mitologi Malind Anim”. <http://juliuscimamuya70.blogspot.com/>.
- Corbey, Raymod. 2010. *Headhunters From the Swamps. The Marind Anim of New Guinea as seen by The Missionaries of the Sacred Heart, 1905-1925*. Leiden: KITLV – Press and C. Zwartenkot Art Books.
- Crozier, Marguerite Nicole. (2011). “Cross-border Tourism Planning and Development: The Case of The Lake !Gariép Initiative”. A Thesis on Development Studies at the Nelson Mandela Metropolitan Univeristy.
- Cuevas-Contreras, Tomás J. dan Isabel Zizaldrá –Hernández. Tanpa Tahun. Cross-Border Tourism Networks, Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico and El Paso, Texas, United States. <http://www.esade.edu/cedit/pdfs/papers/pdf4.pdf>.

- Cultural Ministers Council's Statistics Working Group. "Cultural Tourism Statistic". http://culturaldata.gov.au/publications/statistics_working_group/cultural_tourism/cultural_tourism_statistics.
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Eghenter, Cristina, M. Hermayani Putera, Israr Ardiansyah ed. (2012). *Masyarakat dan Konservasi 50 Kisah yang Menginspirasi dari WWF untuk Indonesia*. WWF Indonesia. ISBN : 978-979-1461-30-6.
- Endresen, Kris. 1999. "Sustainable Tourism and Cultural Heritage A Review of Development Assistance and Its Potential to Promote Sustainability". www.nwhf.no/files/File/culture_fulltext.pdf.
- Esu, Basse Benjamin, (2010) "Promoting an Emerging Tourism Destination". *Global Journal of Management and Business Research*. Vol. 10 Issue 1 (Ver 1.0), Januari 2010.
- Fontana, Andrea dan James H. Frey. (2009). "Wawancara Seni Ilmu Pengetahuan". Dalam Norman K Denzin dan Yvonna S. Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Galudra, Gamma. (2003). "Conservation Policies vs Reality: Case Study of Falura, Fauna and Land Utilization by local Communities in Gunung Halimun-Salak National Park". *ICRAF Southeast Asia Working Paper*. No.2003_4.
- Gupta,Deepak Raj dan Zubair Ahmad Dada. (2011). "Rehabilitating Borderland Destinations: A Strategic Framework Towards Cross-Border Tourism Collaboration". *The Journal of Tourism and Peace Research*, 2(1), 2011 .
- Jafar, Mohamad. (2011). Refleksi Fungsi DJBC sebagai Community Protector. <http://pabeankita.blogspot.com/2011/12/fungsi-customs.htm>.
- Jintranun, Jintanee, Songsak Sriboonchitta, Peter Calkins and Chukiat Chaiboonsri. 2012. "Border Tourism Demand from GMS Countries to Thailand: X12ARIMA and RAMO/SEAT Model". *British Journal of Economics, Management & Trade* 2(2): 125-166, 2012.
- K. Nas. (2014). "Akibat Program MIFEE, Orang Marind Kehilangan Sumber Pangan". <http://tabloidjubi.com/2014/02/10/akibat-program-miffee-orang-marind-kehilangan-sumber-pangan/>.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, (2011). Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi, [www.depkeu.go.id/.../MP3EI revisi-complete_\(20mei11\).pd](http://www.depkeu.go.id/.../MP3EI_revisi-complete_(20mei11).pd).

Kementrian Kehutanan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Balai Taman Nasional Wasur. 2010. “Statistik Balai Taman Nasional Wasur Merauke Papua 2009”.

http://www.dephut.go.id/uploads/files/Stat_BTNW_Merauke_09.pdf .

Kosmaryandi, Nandi, Sambas Basuni, Lilik Budi Prasetyo dan Soeryo Adiwibowo. 2012. “Gagasan Baru Zonasi Taman Nasional: Sintesis Kepentingan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Kehidupan Masyarakat Adat”. *JMHT* Vol. XVIII (2) 2012. ISSN: 2087-0469.

Loket Pelayanan Informasi Peta, Kementrian pekerjaan Umum Republik Indonesia. 2012. <http://loketpeta.pu.go.id/peta/peta-infrastruktur-kabupaten-merauke-2012/>.

Lóránt, David, Toth Géza Bujdosó Zoltán, Remenyik Bulcsú. 2009. “ The Role of Tourism in the Development of Border Regions in Hungary”, <http://www.revecon.ro/articles/2011-2/2011-2-6.pdf>.

Palma, Aguslavia SM., Amran Achmad dan Muhammad Dassir. “Model Kolaborasi Pengelolaan Taman Nasional Wasur”. Fakultas Kehutanan Universitas Hasanudin, Makasar.

Paranginangin, B. (1994). *Usulan Rencana Pengelolaan dan Pola Pengembangan Zona Penyangga Taman Nasional Wasur*. World Wide Fund For Nature. Departemen Kehutanan Merauke.

Pemerintah RI Desak PNG Realisasikan Pembangunan Jalan Perbatasan” . <http://www.batasnegeri.com/pemerintah-ri-desak-png-realisasikan-pembangunan-jalan-perbatasan/>.

Prasetyo Erwin Edhi dan Timbuktu Harthana. (2011). “Suku Marind Hidup di Antara Busur dan Pacul”. <http://tanahair.kompas.com/read/2011/04/17/15110830/Suku.Marind.Hidup.di.Antara.Busur.dan.Pacul>.

Prokkola, Eeva-Kaisa. (2008). “Resources and Barriers in Tourism Development: Cross-Border Cooperation, Regionalization and Destination at the Finnish-Swedish Border”. *FENNIA* 186: 1. ISSN. 0015-0010.

Pusaka. (2013). *Manis dan Pahitnya Tebu. Suara Masyarakat Adat Malind dari Merauke, Papua*. Forest People Programme, Pusaka dan Sawit Watch dengan dukungan dana dari Rights and Resource Initiatives.

Rehage, Judith. (2010). *Toward A Greater International Competitiveness Cross Border Destination: Internal Strategic Organizational Destination Management Criteria For Future Success. A Case Study of The Heterogeneous Cross Border Destination ‘Lake Constance’*. Dissertation on Tourism Destination Management. Breda University of Applied Science.

- Richards, Greg. ed. (1996). *Cultural Tourism in Europe*. Wallingford: CAB International.
- Sambhanthan, Arumasalam. Tanpa Tahun. "Strategic Advantage in Web Tourism Promotion: An e-Commerce Strategy for Developing Countries". <http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1302/1302.5195.pdf>.
- Seric, Neven dan Silvija Vitner Markovic. (2011). "Brand Management in the Practice of Cross Border Tourist Destination". *Academima Turistica* Year 4 No. 2 December 2011.
- Staf Ahli Menteri Negara PPKTI dan Kawasan Tertinggal, Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2003. *Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kontinental. Buku 2*.
- Taczanowska, Karolina. Tanpa Tahun. "The Potentials for Developing Cross-border Tourism between Poland and Slovakia in the Tatra Mountains". Working papers of the Finnish Forest Research Intitute 2. <http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2004/mwp002.htm..>
- Vagionis, Nikolao dan maria Loumioti (2011). "Movies As A Tool of Modern Tourist Marketing". *Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism*. Vol. 6. No. 2. Autumn. 2011.
- Vodeb, Ksenija. (2010). "Cross-Border Regions ans Potential Tourist Destinations Along the Slovene Croatian Frontier". *Tourism and Hospitality Management*, Vol. 16, No. 2, pp. 219-228, 2010.
- Widjono, Adi. Tanpa Tahun. "Analisis Sosial-Budaya Pengembangan Padi di Merauke". Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Bogor.
- Yayasan Almamater Merauke dan United Nation Development Programme (UNDP) Merauke. 2005. *Final Report Kajian Keberadaan dan Kapasitas CSO/CBO Serta Perikehidupan Berkelanjutan Massyarakat pada 4 Kabupaten di Wilayah papua Selatan*. http://www.undp.or.id/papua/docs/livelihoods%20and%20csos%20assessments_almamater%20final%20report.pdf.
- Zhang, Jiaying Robert J. Inbakaran dan Mervyn S. Jackson. (2006). "Understanding Community Attitudes Towards Tourism and Host-Guest interaction in the Urban-Rural Border Region". *Tourism Geographies*. Vol. 8. No. 2. 182-204. May 2006.